

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN BATAS
MAKSIMUM PADA BAHAN TAMBAHAN PANGAN
DI KOTA MAKASSAR**



Skripsi

Di Ajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A. FAUZI NURSYAMSU

Oleh :

10500113294

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM KONSENTRASI PERDATA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Fauzi Nursyamsu

NIM : 10500113294

Tempat/Tgl. Lahir : Makassar, 13 Oktober 1995

Jur/Prodi/Konsentrasi : Ilmu Hukum

Fakultas/Program : Syariah dan Hukum

Alamat : Jl. Tumanurung Raya No 1 Sungguminasa

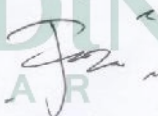
Judul : "PELINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN
BATAS MAKSIMUM PADA BAHAN TAMBAHAN PANGAN DI
KOTA MAKASSAR"

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 10 November 2017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Penulis,



A. Fauzi Nursyamsu
NIM: 10500113294

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul *Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Batas Maksimum pada Bahan Tambahan Pangan di Kota Makassar* yang disusun oleh saudara **A. Fauzi Nursyamsu**, NIM:10500113294. Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasah yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 27 November 2017, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulawal 1439 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan beberapa perbaikan.

Gowa, 27 november 2017
8 rabiulawal 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M. Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dr. H. Abd Halim Talli, M. Ag.	(.....)
Munaqasyah I	: Dr. Marilang, M. Hum.	(.....)
Munaqasyah II	: Istiqamah, S. H., M. H.	(.....)
Pembimbing I	: Drs. H. Munir Salim, M. H.	(.....)
Pembimbing II	: St. Nurjannah, S. H., M. H.	(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Diketahui Oleh :
Dekan Fakultas Syari'ah & Hukum,
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Darussalam Syamsuddin M. Ag.
NIP.19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan berkah kesehatan dan hidayahnya yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul skripsi Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Batas Maksimum pada Bahan Tambahan Pangan di Kota Makassar.

Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi suatu karya tulis ilmiah yang dapat disumbangkan kepada semua pihak yang ingin mengkaji masalah Hukum Perlindungan Konsumen dengan lebih mendalam. Skripsi ini diselesaikan sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana hukum.

Pada kesempatan ini penulis secara khusus memberikan rasa cinta yang tulus dan hormat yang setinggi-tingginya kepada orang tua bapak tercinta Nursyamsu Rahman dan Mama tersayang Nurhaedah Faried, serta kakanda saudara Awaluddin Nurysamsu S.E, yang telah memberikan kasih sayang, doa, perhatian, serta dorongan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan, baik materil maupun moril. Untuk itu perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. selaku

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Dr. Halim Talli, M.Ag. selaku Wakil Dekan 1, Dr. Hamsir, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II dan Dr. Muh. Saleh Ridwan M.Ag, selaku Wakil Dekan III.

2. Bapak Drs. H. Munir Salim. M.H. selaku Pembimbing I dan ibu St. Nurjannah.S.H., M.H. selaku Pembimbing II, yang dengan sabar memberikan tenaga, waktu dan pikiran dalam mengarahkan dan membantu penulis menyelesaikan skripsi.
3. Ibu Dra. Hj. Nuraeni Gani M.M selaku Kepala biro kemahasiswaan. Bapak Abdi Widjaya S.S., M.Ag. selaku Penasehat Akademik penulis. serta bapak dan ibu dosen, staf akademik dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis selama masa studi hingga selesainya skripsi ini.
4. Ibu A. Amirah Nilawati S.Si., Apt., MHSM. Selaku Pfm ahli muda bidang layanan informasi konsumen dan Ibu Dr. Andi Mulyati, Apt., Staf Bidang Pemeriksaan.
5. Sahabat-sahabatku Abd Rahman Bang Jack, Dicky Prayogo, M. Saleh S.H., Nurul Fatimah, Rahniati Bams, Nurlina, Taslim S.H, Muamar Khadafi S.H, Abd. Muzakkir S.H, yang memberikan semangat, menghibur dan menemani penulis di saat suka maupun duka.
6. Kepada Teman seperjuangan penelitian penulis Bahar Nurdin dan seluruh teman-teman mediasi Ilmu Hukum 2013 terkhusus Ilmu Hukum F 2013

7. Teman-teman, kakanda, dan adinda anggota Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Cabang Makassar dan teman-teman KKN Angkatan 53 Desa Rajang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang.

Terakhir Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis dengan penuh kerendahan hati menerima kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan dan semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua.

Akhir kata, tiada kata yang lebih indah penulis patut ucapkan selain doa semoga Allah swt semoga allah senantiasa melimpahkan kasih dan sayangNya atas amalan kebaikan kita.

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gowa, 13 Oktober 2017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Penulis
ALAUDDIN
M A K A S S A R

A. Fauzi Nursyamsu

DAFTAR ISI

Judul	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL/ILUSTRASI	ix
PEDOMAN TRASLITERASI.....	x
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deksripsi Fokus	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS	11
A. Pengertian Perlindungan konsumen	11
B. Asas dan Tujuan perlindungan konsumen	12
C. Pengertian konsumen	14
D. Hak dan kewajiban Konsumen.....	15
E. Pengertian Pelaku Usaha.....	17

F. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	18
G. Pengertian bahan tambahan pangan	24
H. Jenis jenis bahan tambahan pangan.....	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	41
A. Jenis dan Lokasi penelitian	41
B. Pendekatan penelitian	41
C. Sumber data	40
D. Metode pengumpulan data.....	42
E. Teknik pengolahan dan Analisis data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Profil Balai Besar POM di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.....	44
B. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Penggunaan Batas Maksimum pada Bahan Tambahan Pangan oleh Balai Besar POM di Makassar	54
C. Peran Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) dalam mengawasi Penggunaan Batas Maksimum Pada Bahan Tambahan Pangan di Kota Makassar.....	63
BAB V PENUTUP	72
A. KESIMPULAN.....	72
B. SARAN	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	77

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1.	Struktur Organisasi BBPOM Kota Makassar.....	4
Tabel 1.	Batas Maksimum penggunaan Pewarna alami.....	57
Tabel 2.	Batas Maksimum Penggunaan Bahan Pewarna sintesis.....	59
Tabel 3.	Hasil Pengujian Pangan Menurut Parameter uji.....	70



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	Tsa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	shad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dhad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tha	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Dza	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbaik

غ	Gain	G	Eg
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	Lam	L	Ei
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha	H	Ha
أ	hamzah	,	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ().

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ / اَ, اِ	<i>fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	a	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan ya</i>	i	i dan garis di atas
وَ	<i>dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu transliterasinya dengan [h].

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf *ber-tasydiddi* akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah*(i).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *lam* (ل) (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari al-Qur'an), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).



ABSTRAK

Nama : A. Fauzi Nursyamsu

Nim : 105001123294

Judul : Perlindungan Konsumen terhadap Penggunaan Batas Maksimum pada Bahan Tambahan Pangan di kota Makassar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap penggunaan batas maksimum pada bahan tambahan pangan serta peran pemerintah dalam mengawasi penggunaan batas maksimum pada bahan tambahan pangan.

Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu dari hasil wawancara dengan pihak Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Makassar.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen maka setiap produk pangan wajib memenuhi standar keamanan dan mutu pangan, sebagaimana di atur dalam pasal 111 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan bahwa makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan, dan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Implikasi penelitian yaitu, peranan Pemerintah dalam hal ini adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Makassar dalam mengawasi penggunaan batas maksimum pada bahan tambahan pangan yaitu dengan cara menugaskan secara berkala pegawai dari bidang pemeriksaan dan penyidikan ke pasar-pasar tradisional, toko-toko swalayan, pabrik atau industri rumah tangga untuk pengambilan sampel makanan yang terdeteksi yang tidak sesuai dengan ketentuan, yang kemudian akan dilakukan pengujian di laboratorium. Serta memusnahkan makanan tersebut jika dari hasil pemeriksaan, makanan tersebut mengandung bahan yang berbahaya atau tidak sesuai dengan ketentuan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era perdagangan bebas adalah merupakan era keterbukaan dan tanpa hambatan proteksi yang diharapkan terciptanya suatu kondisi perdagangan yang dilandasi oleh prinsip persaingan usaha. Perkembangan perubahan prinsip perdagangan dari era tertutup, tradisional, monopoli dan proteksi kepada era keterbukaan tanpa proteksi merupakan pencerminan dari pertumbuhan pemikiran ke arah modernisasi hubungan antar bangsa-bangsa.

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.¹

¹ Erman Rajagukguk. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Lebih-lebih jika produk yang dihasilkan oleh produsen merupakan jenis produk yang terbatas. Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen.

Lambatnya perkembangan perlindungan konsumen di negara berkembang yang perkembangan industrinya baru pada tahap permulaan karena sikap pemerintah pada umumnya masih melindungi kepentingan industri yang merupakan faktor esensial dalam pembangunan suatu negara.²

Akibat dari perlindungan kepentingan industri pada negara berkembang termasuk Indonesia tersebut, maka ketentuan-ketentuan hukum yang bermaksud untuk memberikan perlindungan kepada konsumen atau anggota masyarakat kurang berfungsi karena tidak diterapkan secara ketat. Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa usaha pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen telah dilakukan sejak lama, hanya saja kadang tidak disadari bahwa pada

²<http://e-journal.uajy.ac.id/1356/2/1HK09051.pdf>

dasarnya tindakan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah merupakan usaha untuk melindungi kepentingan konsumen.³

Hal ini dapat dibuktikan dengan dikeluarkannya berbagai ketentuan perundang-undangan yang apabila dikaji, maka peraturan perundang-undangan tersebut sebenarnya memuat ketentuan yang memberikan perlindungan kepada konsumen, walaupun dalam konsiderans peraturan perundang-undangan tersebut tidak disebutkan untuk tujuan perlindungan konsumen.

Sebagaimana yang diatur dalam pasal 111 undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwa makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan, dan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen

³Ahmadi Miru. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen DiIndonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.1

secara patut; hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; serta hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Penggunaan bahan tambahan pangan pada makanan dan minuman semakin meningkat, terutama setelah adanya penemuan-penemuan termasuk keberhasilan dalam menyintesis bahan kimia baru yang lebih praktis, lebih murah, dan lebih mudah diperoleh, penambahan bahan tambahan pangan atau zat aditif ke dalam makanan merupakan hal yang dipandang perlu untuk meningkatkan mutu suatu produk sehingga mampu bersaing di pasaran.⁴

Produk pangan yang sering dikonsumsi konsumen setiap harinya, yang selama ini diandalkan sebagai sumber protein nabati namun ternyata masyarakat sebagai konsumen tidak menyadari bahwa produk pangan tersebut mengandung bahan berbahaya. Produk pangan yang dimaksud, banyak sekali terdapat pada jajanan sekolah, jajanan pasar, makanan catering, bahkan didalam toko-toko swalayan yang sering kali kita anggap paling bersih dalam hal penyediaan bahan makanan yang

⁴<http://kimrani.blogspot.com/2013/02/dampak-penggunaan-natrium-benzoat.html>

merupakan bentuk dari pasar modern pun tak luput dari ancaman bahan tambahan pangan atau zat aditif.⁵

Pada awalnya bahan tambahan pangan tersebut berasal dari bahan tumbuh-tumbuhan yang selanjutnya disebut zat aditif alami. Tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan kesehatan manusia. Akan tetapi, jumlah penduduk bumi yang makin bertambah menuntut jumlah makanan yang lebih besar sehingga bahan tambahan pangan tidak mencukupi lagi. Oleh karena itu, industri makanan memproduksi makanan yang memakai bahan tambahan pangan buatan (sintetis). Bahan baku pembuatannya adalah dari zat-zat kimia yang kemudian direaksikan. bahan tambahan pangan sintetis yang berlebihan dapat menimbulkan beberapa efek samping misalnya: gatal dan kanker.⁶

Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) dalam proses produksi pangan perlu diwaspadai bersama, baik oleh produsen maupun oleh konsumen. Dampak penggunaannya dapat berakibat positif maupun negatif bagi masyarakat. Penyimpangan dalam penggunaannya akan membahayakan kita bersama, khususnya generasi muda sebagai penerus pembangunan bangsa.

Sebagaimana firman Allah swt QS. Al – Maidah/5: 87 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾

⁵<http://adivanminus.blogspot.com/2012/02/pengaruh-banyaknya-bahantambahan.html>

⁶<http://aabisnis.blogspot.com/2008/04/zat-aditif.html>

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

B. Fokus Penelitian dan Dekripsi Fokus

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dijadikan sebagai fokus penelitian proposal adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penggunaan batas maksimum pada bahan tambahan pangan di Kota Makassar;
2. Bagaimanakah peran pemerintah dalam mengawasi penggunaan batas maksimum pada bahan tambahan pangan di Kota Makassar .

Dalam penelitian ini penulis mengambil fokus bagaimanah upaya Pemerintah dalam mengawasi batas-batas maksimum bahan tambahan pangan, bahan tambahan pangan dilarang, dan yang mengandung bahan berbahaya. Selain itu untuk menelaah perlindungan konsumen terhadap bahan pangan yang berbahaya.

C. Rumusan Masalah

Dengan menelaah latar belakang permasalahan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penggunaan batas maksimum pada bahan tambahan pangan ?
2. Bagaimanakah peranan Pemerintah dalam mengawasi penggunaan batas maksimum pada bahan tambahan pangan ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan suatu bagian yang sangat penting untuk mendiskripsikan secara awal terhadap bagian pokok permasalahan yang ekstensif dengan literature yang berkaitan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan menelaah beberapa permasalahan dalam hal penelitiannya berdasarkan waktu dan tempat tertentu.

1. Perlindungan konsumen

Perlindungan konsumen dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen /UUPK), yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.⁷ Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan markabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang jasa, dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.

2. Bahan Tambahan Pangan

Bahan Tamabahan Pangan adalah bahan yang ditambahkan pada makanan selama proses produksi, pengemasan atau penyimpanan untuk maksud tertentu. Penambahan bahan pangan dalam makanan berdasarkan pertimbangan agar mutu dan kestabilan

⁷ Ahmad miru dan sutarman yodo, *hukum pelindungan konsumen*,(jakarta: rajawali pers, 2010),h.1

makanan tetap terjaga dan untuk mempertahankan nilai gizi yang mungkin rusak atau hilang selama proses pengolahan.⁸

Bahan tambahan makanan adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dalam jumlah kecil, dengan tujuan untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, flavor dan memperpanjang daya simpan. Selain itu dapat meningkatkan nilai gizi seperti protein, mineral dan vitamin. Bahan tambahan makanan adalah bahan yang bukan secara alamiah merupakan bagian dari bahan makanan, tetapi terdapat dalam bahan makanan tersebut karena perlakuan saat pengolahan, penyimpanan atau pengemasan.⁹

Pengertian bahan tambahan pangan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 033 Tahun 2012 secara umum adalah Bahan Tambahan Pangan merupakan bahan yang ditambahkan kedalam Pangan untuk mempengaruhi sifat /atau bentuk Pangan. yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk maksud teknologi pada pembuatan, pengolahan, penyiapan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, dan penyimpanan.¹⁰

Tujuan penggunaan bahan tambahan pangan adalah dapat meningkatkan atau mempertahankan nilai gizi dan kualitas daya simpan, membuat bahan pangan lebih mudah dihidangkan, serta mempermudah preparasi bahan pangan.

⁸Septinas.blogspot.in/2013/04/zat-aditif-pada-makanan.html?m=1

⁹Id.m.wikipedia.org/wiki/Aditif_makanan

¹⁰Wisnu Cahyadi, *Analisis & Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Panga*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 1.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan yang mengandung zat aditif;
2. Untuk mengetahui Sejauhmanakah peran pemerintah dalam mengawasi peredaran makanan yang mengandung zat aditif.

1. Kegunaan Teoritis

- (a) Menelaah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan yang mengandung zat aditif;
- (b) Memberikan kontribusi akademis & praktisi dalam menerapkan perlindungan hukum bagi konsumen.
- (c) Memberikan sumbangsi pemikiran untuk dijadikan bahan penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktisi

(a) Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat dalam hal perlindungan hukum bagi konsumen dimana masyarakat merupakan bagian dari konsumen. Dan memberikan gambaran tentang hak dan kewajiban konsumen yang sesuai dengan aturan perundang-undangan:

(b) Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah dalam hal ini Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) sebagai bahan

pertimbangan di dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang berkaitan dengan makanan yang mengandung zat aditif di indonesia, terkhusus di sulawesi selatan.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya di singkat UUPK) dijelaskan bahwa: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Menurut Mochtar Kusuma atmaja hukum perlindungan konsumen adalah asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/atau jasa konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha dan pemerintah.¹¹ Keperluan adanya hukum untuk memberikan perlindungan konsumen Indonesia merupakan suatu hal yang tidak dapat dijelaskan, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional kita; yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Mengenai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan keamanan, keselamatan atau kesehatan kepada rakyat Indonesia.

¹¹ Erman Rajagukguk. Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 7

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dijelaskan bahwa; “Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.”Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:¹²

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen

¹² Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 25-26.

dalam penggunaan, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsusmsi atau digunakan.

5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Kelima asas yang dijelaskan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu

1. Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen,
2. Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan, dan
3. Asas kepastian hukum.

Radbruch menyebutkan keadilan, kemanfaatan, dan kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai “tiga ide dasar hukum” atau “tiga nilai dasar hukum, yang berarti dapat dipersamakan dengan asas hukum.”¹³

Sedangkan tujuan dari perlindungan konsumen di atur dalam pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian baran dan/atau jasa;

¹³ Gustav Radbruch, Legal Philosophy, in The Legal Philosophy of Lask, and dabin, HarvardUnivesity Press, Massachusetts, 1950, hlm 107.

- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.” Keenam tujuan khusus perlindungan konsumen yang dijelaskan diatas bila dikelompokkan kedalam tiga tujuan hukum secara umum, maka tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan.

B. Konsumen dan Pelaku Usaha

1. Pengertian Konsumen

Pengertian konsumen di atur dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yaitu:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali.”

Pengertian konsumen dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) di atas lebih luas bila dibandingkan dengan rancangan undang-undang

perlindungan konsumen lainnya, yaitu pertama dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diajukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, yang menentukan bahwa: “konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan.

Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak konsumen di atur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yaitu;

- a.. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.”¹⁴

Selain hak konsumen, kewajiban konsumen juga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yaitu: “Kewajiban konsumen, adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.”

Menyangkut kewajiban konsumen beritikad baik hanya tertuju pada transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen. Berbeda dengan pelaku usaha kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha).

¹⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.25.

2. Pelaku Usaha

A. Pengertian Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Perlindungan konsumen (UUPK), yaitu: “pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Istilah pelaku usaha adalah istilah yang digunakan oleh pembuat undang-undang yang pada umumnya lebih dikenal dengan istilah pengusaha. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) menyebut empat kelompok besar kalangan pelaku ekonomi, tiga diantaranya termasuk kelompok pengusaha (pelaku usaha, baik privat maupun publik). Ketiga kelompok pelaku usaha tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kalangan investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan, seperti perbankan, usaha leasing, tengkulak, penyedia dana lainnya, dan sebagainya.
2. Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa-jasa lain (bahan baku, bahan tambahan/penolong, dan bahan-bahan lainnya). Mereka terdiri atas orang atau badan usaha berkaitan dengan pangan, orang/badan yang memproduksi sandang, orang/usaha yang berkaitan dengan pembuatan perumahan,

orang/usaha yang berkaitan dengan¹⁵ jasa angkutan, perasuransian, perbankan, orang/usaha yang berkaitan dengan obat-obatan, kesehatan, narkotika, dan sebagainya;

3. Distributor, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat, seperti pedagang secara retail, pedagang kaki lima, warung, toko, supermarket, hypermarket, rumah sakit, klinik, warung dokter, usaha angkutan (darat, laut, udara), kantor pengacara dan sebagainya.

B. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Adapun hak pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 6 UUPK, yaitu:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

¹⁵Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 17.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai dengan kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Dalam praktek yang biasa terjadi, suatu barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah daripada barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.¹⁶

Sedangkan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UUPK, yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaa, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

¹⁶Adrian Sutedi, tanggungjawab produk dalam perlindungan konsumen, ghali indonesia, bogor , 2008, hlm. 11.

- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.”

Dalam UUPK pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, sedangkan bagi konsumen, diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

Tentang kewajiban kedua pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi disamping merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi atau informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk, yang akan sangat merugikan konsumen.¹⁷

C. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Sebagai upaya untuk menghindarkan akibat negatif pemakaian barang dan/atau jasa, maka Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menentukan berbagai larangan bagi pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 8 sampai Pasal 17.

¹⁷Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.Hlm.21.

Pasal 8 dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang dapat membahayakan konsumen dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 menjelaskan tentang larangan bagi pelaku usaha dalam menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar.

Pasal 10 menjelaskan tentang larangan bagi pelaku usaha untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan atas barang dan/atau jasa tertentu.

Pasal 11 menjelaskan tentang larangan bagi pelaku usaha untuk mengelabui atau menyesatkan konsumen dalam hal penjualan yang dilakukan dengan cara obral atau lelang dengan menyatakan bahwa barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan standar mutu dan seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi, dan tidak menyediakan barang dan/atau jasa dalam jumlah yang cukup dengan maksud untuk menjual barang dan/atau jasa yang lain, serta menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Pasal 12 menjelaskan tentang larangan bagi pelaku usaha dalam menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, dan bermaksud untuk tidak melaksanakannya.

Pasal 13 menjelaskan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa serta obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan menjanjikan hadiah berupa barang dan/atau jasa dan bermaksud untuk tidak memberikan sebagaimana yang dijanjikan.

Pasal 14 menjelaskan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau/jasa dengan memberikan hadiah melalui cara undian dilarang untuk tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan, tidak mengumumkan hasilnya melalui media massa, memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan, dan mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

Pasal 15 menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan barang dan/atau jasa dengan cara pemaksaan atau dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis bagi konsumen.

Pasal 16 menjelaskan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk tidak menepati pesanan dan janji atas suatu pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan.

Pasal 17 menjelaskan bahwa pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang mengelabui konsumen dan mengungkapkan hal-hal yang tidak benar serta melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.

D. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), tanggung jawab pelaku usaha yaitu:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
2. Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) dapat diketahui bahwa tanggungjawab pelaku usaha, meliputi:
 - a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
 - b. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran, dan
 - c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggung jawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami oleh konsumen.¹⁸

C. Bahan Tambahan Pangan

1. Pengertian Bahan Tambahan Pangan

Bahan Tambahan Pangan adalah bahan yang ditambahkan pada makanan selama proses produksi, pengemasan atau penyimpanan untuk maksud tertentu. Penambahan bahan tambahan pangan dalam makanan berdasarkan pertimbangan agar mutu dan kestabilan makanan tetap terjaga dan untuk mempertahankan nilai gizi yang mungkin rusak atau hilang selama proses pengolahan.¹⁹

Zat aditif makanan adalah bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dalam jumlah kecil, dengan tujuan untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, flavor dan memperpanjang daya simpan. Selain itu dapat meningkatkan nilai gizi seperti protein, mineral dan vitamin. Bahan tambahan makanan adalah bahan yang bukan secara alamiah merupakan bagian dari bahan makanan, tetapi terdapat dalam bahan makanan tersebut karena perlakuan saat pengolahan, penyimpanan atau pengemasan.²⁰

¹⁸ Ahmadi amiru, perlindunganhukumbagikonsumen di indonesia, rajwalipers, 2013, jakarta, hlm 50-51.

¹⁹ Septinas.blogspot.in/2013/04/zat-aditif-pada-makanan.html?m=1

²⁰ Id.m.wikipedia.org/wiki/Aditif_makanan

Pengertian bahan tambahan pangan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 772/Menkes/Per/ IX/88 dan No. 1168/Menkes/PER/X/1999 (sekarang telah diganti Peraturan Menteri Kesehatan No. 033 Tahun 2012) secara umum adalah bahan yang ditambahkan kedalam makanan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk makanan, mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk maksud teknologi pada pembuatan, pengolahan, penyiapan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, dan penyimpanan.²¹

Tujuan penggunaan bahan tambahan pangan adalah dapat meningkatkan atau mempertahankan nilai gizi dan kualitas daya simpan, membuat bahan pangan lebih mudah dihidangkan, serta mempermudah preparasi bahan pangan. Pada umumnya bahan tambahan pangan dapat dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu:

1. Bahan tambahan pangan sintesis (buatan) yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan, dengan mengetahui komposisi bahan tersebut dan maksud penambahan itu dapat mempertahankan kesegaran, cita rasa, dan membantu pengolahan, sebagai contoh pengawet, pewarna, dan pemanis.
2. Bahan tambahan pangan alami, yaitu bahan makanan yang memiliki fungsi alami selama proses produksi, pengolahan, dan pengemasan.. Contoh bahan tambahan pangan dalam golongan ini dapat diperoleh dari alam, seperti, daun salam, daun pandan, kunyit, jahe, gula, aren dan asam.

²¹ Wisnu Cahyadi, Analisis & Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Pangan, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 1.

Bahan tambahan pangan yang digunakan hanya dapat dibenarkan apabila:²²

1. Dimaksudkan untuk mencapai masing-masing tujuan penggunaan dalam pengolahan;
2. Tidak digunakan untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang salah atau tidak memenuhi persyaratan;
3. Tidak digunakan untuk menyembunyikan cara kerja yang bertentangan dengan cara produksi yang baik untuk pangan.
4. Tidak digunakan untuk menyembunyikan kerusakan bahan pangan.

Di Indonesia telah disusun peraturan tentang Bahan Tambahan Pangan yang diizinkan ditambahkan dan yang dilarang (disebut Bahan Tambahan Kimia) oleh Departemen Kesehatan diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan, terdiri dari golongan Bahan Tambahan Pangan yang diizinkan di antaranya sebagai berikut:²³

1. Antioksidan (antioxidant).
2. Antikempal (anticaking agent).
3. Antibuih (antifoaming agent)
4. Bahan pengkarbonasi (carbonating agent)
5. Garam pengemulsi (emulsifying salt)
6. Gas untuk kemasan (packaging gas)
7. Humektan (humectant)

²²Peraturan menteri kesehatan RI, nomor: 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan

²³Peraturan menteri kesehatan RI, Nomor: 033 tahun 2012, tentang golongan bahan tambahan pangan yang diizinkan.

8. Pelapis (glazing agent)
9. Pemanis (sweetener)
10. Pembawa (carrier)
11. Pembentuk gel (gelling agent)
12. Pembuih (foaming agent)
13. Pengatur keasaman (acidity regulator)
14. Pengawet (preservative).
15. Pengembang (raising agent)
16. Pengemulsi (emulsifier)
17. Pengental (thickener)
18. Pengeras (firming agent)
19. Penguat rasa (flavour enhancer)
20. Peningkat volume (bulking agent)
21. Penstabil (stabilizer)
22. Peretensi warna (colour retention agent)
23. Perisai (flavouring)
24. Perlakuan tepung (flour treatment agent)
25. Pewarna (colour).
26. Propelan (propellant)
27. Sekuestran (sequestrant).

Selain bahan tambahan pangan yang tercantum dalam Peraturan Menteri tersebut masih ada beberapa bahan tambahan pangan lainnya yang biasa digunakan dalam pangan, misalnya:

1. Enzim, yaitu bahan tambahan pangan yang berasal dari hewan, tanaman, atau mikroba, yang dapat menguraikan zat secara enzimatis, misalnya membuat pangan lebih empuk, lebih larut, dan lain-lain.
2. Penambah gizi, yaitu bahan tambahan berupa asam amino, mineral, atau vitamin, baik tunggal maupun campuran, yang dapat meningkatkan nilai gizi pangan.
3. Humektan, yaitu bahan tambahan pangan yang dapat menyerap lembab (uap air) sehingga mempertahankan kadar air pangan.

Beberapa bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam makanan, Berdasarkan Permenkes RI No. 033 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan sebagai berikut:

1. Asam borat dan senyawanya (boric acid).
2. Formalin (formaldehyde).
3. Minyak nabati yang dibrominasi (brominated vegetable oils).
4. Kloram fenikol (chloramphenicol).
5. Kalium klorat (potassium chlorate).
6. Dietilpirokarbonat (diethylpyrocabonate, DEPC).
7. Nitrofuranzon (nitrofurazone).
8. P-Phenetilkarbamida (p-phenethylcarbamide, dulcin, 4-ethoxyphenyl urea).

9. Asam salisilat dan garamnya (salicylic acid and its salt)
10. Kokain (cocaine)
11. Sinamilantranilat (cinnamyl anthranilate)
12. Dulkamara (dulcamara)
13. Nitrobenzen (nitrobenzene)
14. Dihidrosafrol (dihihrosfrole)
15. Dulsin (dulcin)
16. Minyak kalamus (calamus oil)
17. Minyak tansi (tansy oil)
18. Minyak sasafras (sasafras oil)
19. biji tonka (tonka bean).²⁴

2. Jenis-Jenis Bahan Tambahan Pangan

Ada beberapa jenis Bahan Tambahan Pangan yang sering digunakan oleh pelaku usaha pada makanan, yaitu:

A. Bahan Pengawet.

Bahan pengawet adalah senyawa yang mampu menghambat dan menghentikan proses fermentasi, pengasaman, atau bentuk kerusakan lainnya, atau bahan yang dapat memberikan perlindungan bahan pangan dari pembusukan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan yang mencegah atau menghambat

²⁴PeraturanMenterikesehatanRi No 033 Tahun 2012, TentangBahanTambahanPangan yang dilarang

fermentasi, pengasaman, atau peruraian lain terhadap pangan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Zat pengawet terdiri dari senyawa organik dan anorganik dalam bentuk asam dan garamnya. Aktivitas-aktivitas bahan pengawet tidaklah sama, misalnya ada yang efektif terhadap bakteri, khamir, ataupun kapang.²⁵

Secara ideal, bahan pengawet akan menghambat atau membunuh mikroba yang penting dan kemudian memecah senyawa berbahaya menjadi tidak berbahaya dan tidak toksik. Bahan pengawet akan memengaruhi dan menyeleksi jenis mikroba yang dapat hidup pada kondisi tersebut. Derajat penghambatan terhadap kerusakan bahan pangan oleh mikroba bervariasi dengan jenis bahan pengawet yang digunakan dan besarnya penghambatan ditentukan oleh konsentrasi bahan pengawet yang digunakan.

Secara umum penambahan bahan pengawet pada pangan bertujuan sebagai berikut:

1. Menghambat pertumbuhan mikroba pembusuk pada pangan baik yang bersifat patogen maupun yang tidak patogen.
2. Memperpanjang umur simpan pangan.
3. Tidak menurunkan kualitas gizi, warna, cita rasa, dan bau bahan pangan yang diawetkan.
4. Tidak untuk menyembunyikan keadaan pangan yang berkualitas rendah.
5. Tidak digunakan untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang salah atau yang tidak memenuhi persyaratan.

²⁵PermenkesRi no 033 tahun 2012 tentang bahantambahan pangan pengawet

6. Tidak digunakan untuk menyembunyikan kerusakan bahan pangan.

Terdapat beberapa persyaratan untuk bahan pengawet kimiawi lainnya, selain persyaratan yang dituntut untuk semua bahan tambahan pangan, antara lain sebagai berikut:

1. Memberi arti ekonomis dari pengawetan.
2. Digunakan hanya apabila cara-cara pengawetan yang lain tidak mencukupinya atau tidak tersedia.
3. Memperpanjang umur simpan dalam pangan.
4. Tidak menurunkan kualitas (warna, cita rasa, dan bau) bahan pangan yang diawetkan.
5. Mudah dilarutkan.
6. Menunjukkan sifat-sifat antimikroba pada jenjang bahan pangan yang diawetkan.
7. Aman dalam jumlah yang diperlukan.
8. Mudah ditentukan dengan analisis kimia.
9. Tidak menghambat enzim-enzim pencernaan.
10. Tidak mengalami dekomposisi atau tidak bereaksi untuk membentuk suatu senyawa kompleks yang bersifat lebih toksik.
11. Mudah dikontrol dan didistribusikan secara merata dalam bahan pangan.
12. Mempunyai spektra antimikroba yang luas, meliputi macam-macam pembusukan oleh mikroba yang berhubungan dengan bahan pangan yang diawetkan. Melihat persyaratan tersebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa

penambahan bahan pengawet pada bahan pangan adalah untuk memperpanjang umur simpan bahan pangan tanpa menurunkan kualitas dan tanpa mengganggu kesehatan.

B. Bahan Pewarna

Bahan pewarna secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu benda berwarna yang memiliki afinitas kimia terhadap benda yang diwarnainya. Bahan pewarna pada umumnya memiliki bentuk cair dan larut di air.²⁶ Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan suatu bahan pangan berwarna, antara lain dengan penambahan zat pewarna. Secara garis besar, berdasarkan sumbernya dikenal dua jenis zat pewarna yang termasuk dalam golongan bahan tambahan pangan, yaitu pewarna alami dan pewarna sintetis.²⁷

Pewarna alami merupakan zat warna yang berasal dari ekstrak tumbuhan (seperti bagian daun, bunga, biji), hewan dan mineral yang telah digunakan sejak dahulu sehingga sudah diakui bahwa aman jika masuk ke dalam tubuh. Sedangkan pewarna sintetis merupakan zat warna yang berasal dari zat kimia, yang sebagian besar tidak dapat digunakan sebagai pewarna makanan karena dapat menyebabkan gangguan kesehatan terutama fungsi hati di dalam tubuh kita.²⁸

Beberapa alasan utama menambahkan zat pewarna pada makanan, yaitu:²⁹

²⁶id.m.wikipedia.org/wiki/Bahan_pewarna

²⁷ Wisnu Cahyadi. Op.Cit. hlm. 61.

²⁸<https://fhienhasidwi.wordpress.com/2013/04/03/pewarna-alami-dan-pewarnasintetik/>

²⁹ <https://informasisehat.wordpress.com/tag/bahan-pewarna-makanan/>

1. Untuk memberi kesan menarik bagi konsumen.
2. Menyeragamkan warna makanan dan membuat identitas produk pangan.
3. Untuk menstabilkan warna atau untuk memperbaiki variasi alami warna.
4. Untuk menutupi perubahan warna akibat paparan cahaya, udara atau temperatur yang ekstrim akibat proses pengolahan dan selama penyimpanan.
5. Untuk menjaga rasa dan vitamin yang mungkin akan terpengaruh sinar matahari selama produk simpan.

Dalam hal ini penambahan warna bertujuan untuk menutupi kualitas yang rendah dari suatu produk yang sebenarnya tidak dapat diterima, apalagi bila menggunakan zat pewarna yang berbahaya.

C. Bahan Pemanis

Zat pemanis sintetis merupakan zat yang dapat menimbulkan rasa manis atau dapat membantu mempertajam penerimaan terhadap rasa manis tersebut, sedangkan kalori yang dihasilkannya jauh lebih rendah daripada gula. (Winarno, 1997)³⁰

Pemanis merupakan senyawa kimia yang sering ditambahkan dan digunakan untuk keperluan produk olahan pangan, industri, serta minuman dan makanan kesehatan. Pemanis berfungsi untuk meningkatkan cita rasa dan aroma, memperbaiki sifat-sifat fisik, sebagai pengawet, memperbaiki sifat-sifat kimia sekaligus merupakan sumber kalori bagi tubuh, mengembangkan jenis minuman dan makanan dengan jumlah kalori terkontrol, mengontrol program pemeliharaan dan penurunan berat

³⁰ Wisnu Cahyadi, hukumperlindungan konsumen, bumiaksara, bandung, 2004, hlm. 76.

badan, mengurangi kerusakan gigi, dan sebagai bahan substitusi pemanis utama (Eriawan R & Imam P.,2002)

Pemanis dapat dikelompokkan menjadi pemanis alami dan pemanis buatan (sintetis). Pemanis alami biasanya berasal dari tanaman. Tanaman penghasil pemanis yang utama adalah tebu (*Saccharum officinarum* L) dan bit (*Beta vulgaris* L). Bahan pemanis yang dihasilkan dari kedua tanaman tersebut dikenal sebagai gula atau sukrosa.

Beberapa bahan pemanis alami yang sering digunakan adalah: Sukrosa, Laktosa, Maltosa, Galaktosa, D-Glukosa, D-Fruktosa, Sorbitol, Manitol, Gliserol, dan Glisina. Pemanis sintetis adalah bahan tambahan yang dapat menyebabkan rasa manis pada pangan, tetapi tidak memiliki nilai gizi, beberapa pemanis sintetis yang telah dikenal dan banyak digunakan adalah: Sakarin, Siklamat, Aspartam, Dulsin, Sorbitol sintetis, dan Nitro-propoksi-anilin.

Pemanis ditambahkan ke dalam bahan pangan mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:

1. Sebagai pangan bagi penderita diabetes melitus karena tidak menimbulkan kelebihan gula darah.
2. Memenuhi kebutuhan kalori rendah untuk penderita kegemukan.
3. Sebagai penyalut obat, beberapa obat mempunyai rasa yang tidak menyenangkan, karena itu untuk menutupi rasa yang tidak enak dari obat tersebut biasanya dibuat tablet yang bersalut.

4. Menghindari kerusakan gigi, pada pangan seperti permen lebih sering ditambahkan pemanis sintetis karena bahan permen ini mempunyai rasa manis yang lebih tinggi dari gula, pemakaian dalam jumlah sedikit saja sudah menimbulkan rasa manis yang diperlukan sehingga tidak merusak gigi.

5. Pada industri pangan, minuman, termasuk industri rokok, pemanis sintetis dipergunakan dengan tujuan untuk menekan biaya produksi, karena pemanis sintetis ini selain mempunyai tingkat rasa manis yang lebih tinggi juga harganya relatif murah dibandingkan dengan gula yang diproduksi di alam.

D. Penyedap Rasa dan Aroma

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan, penyedap rasa dan aroma, dan penguat rasa didefinisikan sebagai bahan tambahan pangan yang dapat memberikan, menambah atau mempertegas rasa dan aroma. Penyedap rasa merupakan gabungan dari semua perasaan yang terdapat dalam mulut, termasuk mouth-feel. Suatu pangan mempunyai rasa asin, manis, asam, atau pahit dengan aroma yang khas. Mouth-feel suatu bahan pangan adalah perasaan kasar–licin, lunak-liat, dan cair-kental. Penyedap rasa bukan hanya merupakan suatu zat, melainkan suatu komponen tertentu yang mempunyai sifat khas.

Bahan penyedap ada yang berasal dari bahan alami, seperti bumbu, herba, daun minyak esensial, ekstrak tanaman atau hewan, dan oleorisin. Namun, pada saat ini sudah dapat dibuat bahan penyedap sintetis, yang merupakan komponen atau zat yang dibuat menyerupai flavor penyedap alami. Contoh untuk mendapatkan aroma

kopi yang senyawa aromatisnya adalah alfa furfural merkaptan disusun formula dari alfa furfural merkaptan (10%), etil vanilin (3%), dan pelarut (87%). Contoh lainnya adalah aroma bawang putih dapat dihasilkan oleh dialil trisulfida.

Tujuan penggunaan penyedap rasa dalam pengolahan pangan adalah sebagai berikut:

1. Mengubah aroma hasil olahan dengan penambahan aroma tertentu selama pengolahan, misalnya keju dan yoghurt.
2. Modifikasi, pelengkap, atau penguat aroma. Contoh, penambahan aroma ayam pada pembuatan sup ayam, dan aroma butter pada pembuatan margarin.
3. Menutupi atau menyembunyikan aroma bahan pangan yang tidak disukai. Contoh, bau langu (beany flavor) pada kedelai, dan after taste. Beberapa minuman ringan yang kurang disenangi.
4. Membentuk aroma baru atau menetralkan bila bergabung dengan komponen dalam bahan pangan. Contoh penambahan krim pada kopi menyebabkan aroma spesifik dan juga dapat mengurangi rasa pahit. Penambahan vanili dapat memberi kesan rasa yang lebih manis dan dapat memperkuat semua aroma yang ada dalam bahan.

E. Pengatur Keasaman

Pengatur keasaman (asidulan) merupakan senyawa kimia yang bersifat asam dan merupakan salah satu dari bahan tambahan pangan yang sengaja ditambahkan ke dalam pangandengan berbagai tujuan. Asidulan dapat bertindak sebagai penegas rasa

dan warna atau menyelubungi offer taste yang tidak disukai. Sifat asam senyawa ini dapat mencegah pertumbuhan mikroba dan bertindak sebagai bahan pengawet.

Penggunaan pengatur keasaman di dalam pangan, yaitu untuk memperoleh rasa asam yang tajam, sebagai pengontrol pH, atau sebagai pengawet. Salah satu tujuan utama penambahan asam pada bahan pangan adalah untuk memberikan rasa asam. Asam juga dapat mengintensifkan penerimaan rasa-rasa lain. Unsur yang menyebabkan rasa asam adalah ion H^+ atau ion hidrogenium H_3O^+ .

3. Penggunaan Bahan Tambahan Pangan pada Makanan

Penggunaan bahan tambahan pangan pada makanan diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, yaitu:

1. Setiap orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan:
 - a. Bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan
 - b. Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan.
2. Ketentuan mengenai ambang batas maksimal dan bahanyang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.³¹

Bahan tambahan pangan yang ada pada makanan tidak selalu secara sengaja ditambahkan untuk tujuan tertentu. Namun, ada juga zat yang diperoleh secara tidak sengaja muncul pada makanan. Bahan tambahan pangan tersebut biasanya muncul

³¹ Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

pada proses pengolahan makanan. Secara keseluruhan, penggunaan zat-zat untuk campuran makanan dapat berdampak positif dan negatif.

A. Dampak Positif Penggunaan Bahan Tambahan Pangan

Ada beberapa penyakit yang dapat disembuhkan dengan menggunakan zat aditif. Misalnya Penyakit gondok yang berupa pembengkakan kelenjar pada leher. Penyakit gondok disebabkan karena tubuh kurang mendapatkan zat iodin atau yodium. Zat iodin atau yodium ini dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan tingkat metabolisme dasar tubuh, membantu mengeluarkan racun kimia dalam tubuh, meningkatkan kekebalan tubuh dan mencegah kelenjar tiroid yang membesar. Sehingga penyakit gondok dapat dicegah dengan mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung zat iodin.

Zat iodin dapat kita peroleh dari garam dapur yang biasa digunakan untuk memberikan rasa asin pada makanan, Iodium ditambahkan dalam garam sebagai zat aditif atau suplemen dalam bentuk kalium iodat (KIO_3). Selain penyakit gondok, kekurangan iodin dapat pula menyebabkan penyakit kretinisme (kekerdilan). Orang yang menderita penyakit diabetes melitus (kencing manis) perlu menjaga kestabilan kadar gula dalam darah, bagi penderita diabetes melitus disarankan untuk mengkonsumsi sakarin (pemanis buatan) sebagai pengganti gula.³²

B. Dampak Negatif Penggunaan Bahan Tambahan Pangan.

Kemajuan teknologi di bidang pangan dapat memacu manusia untuk menciptakan bahan makanan dengan kualitas yang makin baik. Kualitas makanan

³² <http://chabibullah.com/makalah-zat-aditif/>

yang baik tidak dapat dilihat dari bentuk tampilan luarnya saja, akan tetapi yang paling penting adalah kandungan gizi dalam makanan tersebut. Saat ini telah banyak ditemukan makanan yang unggul karena telah melalui berbagai proses produksi sehingga memiliki ketahanan yang lebih lama jika dibandingkan dengan kondisi normalnya. Misalnya, ikan sarden dalam kemasan kaleng dapat bertahan berbulan-bulan, bahkan hingga satu tahun lamanya tanpa mengalami pembusukan. Ikan sarden tersebut dapat bertahan lama setelah ditambahkan zat pengawet pada proses produksimakanan tersebut. Namun, bahan makanan yang menggunakan zat pengawet tidak dapat dikonsumsi setelah melewati masa kadaluarsa.

Ada beberapa zat aditif yang diizinkan, namun diindikasikan dapat menimbulkan efek negatif jika digunakan secara berlebihan yaitu:

1. Kalium Nitrit, Kalium nitrit berwarna putih atau kuning dan kelarutannya tinggi dalam air. Jumlah nitrit yang ditambahkan biasanya 0,1% atau 1 gram/kg bahan yang diawetkan. Bila lebih dari jumlah tersebut bisa menyebabkan keracunan, dapat mempengaruhi kemampuan sel darah membawa oksigen ke berbagai organ tubuh, menyebabkan kesulitan bernafas, sakit kepala, anemia, radang ginjal dan muntah-muntah.
2. Zat pewarna, Pada zat aditif ini, dampak negatif dapat timbul apabila penggunaannya berulang walaupun dalam jumlah kecil, dan dimakan dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan penyakit misalnya kanker hati.

3. Aspartam, Penggunaan aspartam dapat menyebabkan kerusakan otak yang pada akhirnya akan mengakibatkan cacat mental khususnya pada penderita penyakit keturunan dan kelemahan mental.
4. Monosodium Glutamate (MSG), Penggunaan MSG dapat menyebabkan kesemutan pada punggung, leher, rahang bawah, wajah berkeringat, sesak dada bagian bawah.³³



³³ <http://adhysuparsa.blogspot.com/2013/02/zat-adiktif.html?m=1>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan. Selain itu, juga melakukan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, factual dan akurat terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan. Adapun lokasi penelitian adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif (hukum positif), pendekatan yang meninjau dan menganalisa masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip dan berdasarkan data kepustakaan melalui library research, penelitian ini menekankan segi-segi yuridis, dan melihat pada peraturan perundang-undangan dan penetapannya.

C. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Dataprimer, yaitu informasi yang diperoleh melalui penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang, dalam hal ini Kepala Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen (SerLIK) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Makassar.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis yang mencakup tulisan-tulisan yang melalui hasil penelitian ilmiah, internet, dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian

D. Metode Pengumpulan Data

Di dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Teknik Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen bisa terbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambar atau karya-karya yang bersangkutan.

3. Observasi

Observasi proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang di teliti. Observasi ini menjadi salah satu dari teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan di catat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reabilitasi) dan kesahihannya (validitasnya).

E. Teknik Pengolahan dan Analisi Data

Berdasarkan data primer dan data sekunder yang telah diperoleh, penulis kemudian akan mengolah data tersebut dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam menganalisis data yang ada untuk menguraikan dan menjelaskan permasalahan mengenai perlindungan konsumen dalam hubungannya dengan hukum perlindungan konsumen terhadap batas maksimum pada penggunaan bahan tambahan pangan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan terarah dari hasil penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Balai Besar POM di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan

1. Letak Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Makassar

Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Makassar terletak di jalan Baji Minasa No. 2 Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Letak Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Makassar sangat strategis tepatnya di tengah kota, sehingga memudahkan akses bagi Masyarakat Kota Makassar menjangkau Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Makassar tersebut.

Adapun batas-batas letak Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Makassar, sebagai berikut:

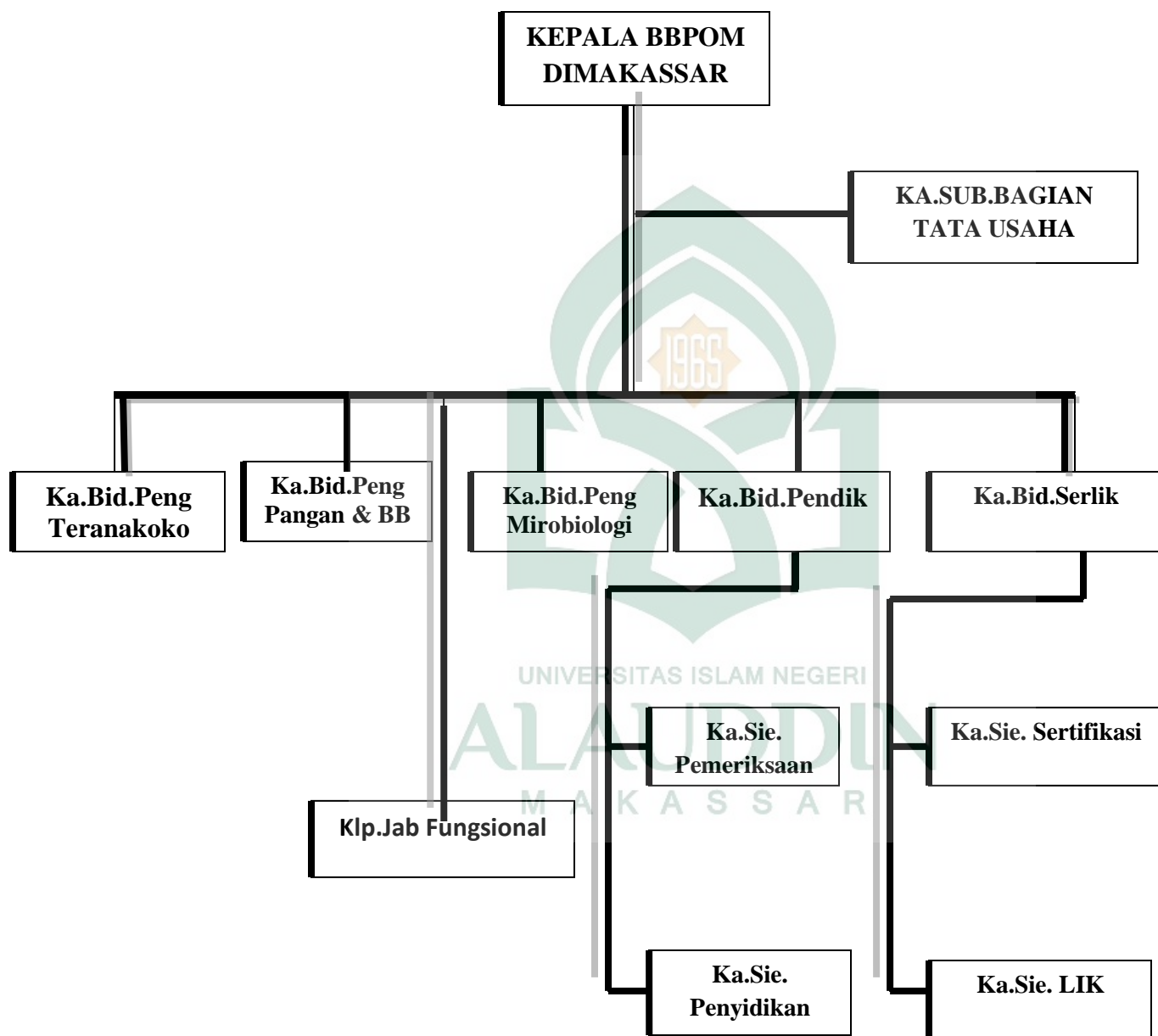
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Pasar Senggol Makassar.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Stadion sepak bola Andi Matalatta Makassar.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Sakit Labuan Baji Makassar.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Dinas Kehutanan Kota Makassar.

Letak Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Makassar juga tidak jauh dari perkantoran pemerintah lainnya, seperti Kampus STIEM Bogayya, Akper Muhammadiyah Makassar, SMANegeri 14 Makassar, SMA Negeri 2 Makassar, SMK Negeri 1 Makassar, Rumah Sakit Kepolisian Daerah Makassar, dll.

2. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Makassar.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPOM disusun berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004. Khusus Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar/Balai POM disusun berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014.

Gambar Struktur Organisasi BBPOM di Makassar



Sesuai dengan struktur organisasi yang ada pada gambar secara garis besar unit-unit kerja BPPOM di Makassar dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1).Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk komplemen mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang produk terapeutik, narkotika, obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen.
- 2).Bidang Pengujian Pangan dan bahan Berbahaya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan dan bahan berbahaya.
- 3).Bidang Pengujian Mikrobiologi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu secara mikrobiologi.
- 4).Bidang Pemeriksaan dan penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan instansi kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapeutik, Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik, Produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.

5).Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu dan layanan informasi konsumen.

6).Sub. Bagian tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan BBPOM di Makassar

3. Visi, Misi dan Tujuan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota

Makassar

1) VISI

Visi BBPOM di Makassar sepenuhnya mengacu kepada Visi BPOM 2015-2019 yang telah ditetapkan oleh Badan POM yaitu:

"Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa"

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Penjelasan VISI	
Aman :	Daya Saing :
Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian	Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang telah memenuhi standar, baik standar

sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/dapat ditoleransi/tidak membahayakan saat digunakan pada manusia. Dapat juga diartikan bahwa khasiat/manfaat Obat dan Makanan meyakinkan, keamanan memadai, dan mutunya terjamin.	nasional maupun internasional, sehingga adanya kesiapan suatu produk bangsa untuk interaksi di masa depan.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata sesuai dengan Tugas dan Fungsi BBPOM di Makassar sebagaimana yang telah ditetapkan. Misi BPOM yang menjadi acuan BBPOM di Makassar adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan satu-kesatuan fungsi (full spectrum) standardisasi yang ditetapkan oleh Badan POM, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk serta penegakan hukum.

2. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.

Pelaku usaha Sebagai salah satu pilar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM) merupakan pemangku kepentingan yang mampu memberikan jaminan produk yang memenuhi standar dengan memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan.

BBPOM di Makassar dalam melakukan Pengawasan harus bersikap konsisten terhadap pelaku usaha, yaitu dengan melaksanakan proses pemeriksaan serta pembinaan dengan baik sehingga pelaku usaha dapat memberikan produk yang aman, bermanfaat/berkhasiat, bermutu dan berdaya saing. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kemandirian dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan.

Masyarakat dalam hal ini sebagai konsumen mempunyai peran yang sangat strategis untuk dilibatkan dalam pengawasan Obat dan Makanan, utamanya pada sisi demand. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi objek upaya peningkatan kesadaran untuk memilih Obat dan Makanan yang memenuhistandar, tetapi juga diberi kemudahan akses informasi dan

komunikasi terkait Obat dan Makanan sehingga dapat berperan aktif dalam meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan.

Dengan kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat, BBPOM di Makassar melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan seperti melalui kegiatan Pemberdayaan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pihak lain.

Terkait dengan bidang kesehatan, peran Kab/Kota yang ada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar. Untuk itu, BBPOM di Makassar harus bersinergi dengan lintas sektor terkait, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan.

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM Untuk mendorong misi pertama dan kedua, diperlukan sumber daya yang memadai dalam mencapai kapasitas kelembagaan yang kuat, dalam hal ini terkait dengan sumber daya manusia dan sarana-prasarana penunjang kinerja. BBPOM di Makassar harus mampu mengelola sumber daya yang terbatas dari segi kuantitas dan kualitasnya secara efektif dan efisien untuk mewujudkan sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Dari segi organisasi, BBPOM di Makassar perlu meningkatkan kualitas kinerja dengan tetap mempertahankan sistem manajemen mutu dan prinsip

organisasi pembelajar (learning organization) dengan memperkuat koordinasi internal dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta saling bertukar informasi.

3) Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarya dan berkarya.



4) Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat. Ukuran keberhasilan atau indikator kinerja adalah Tingkat kepuasan masyarakat Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat atas jaminan pengawasan BBPOM di Makassar.
2. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi. Dengan indikator kinerja :
 - a. Tingkat kepatuhan pelaku usaha Obat dan Makanan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat dalam memenuhi ketentuan;
 - b. Tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Batas Maksimum Pada Bahan Tambahan Pangan

Sebagaimana telah dijelaskan pada latar belakang bahwa produk pangan yang diandalkan oleh kosumen sebagai sumber protein setiap harinya, akan tetapi konsumen tidak menyadari bahwa produk pangantersebut mengandung bahan yang melampaui batas maksimum .produk panganyang dimaksud banyak sekali terdapat pada jajanan sekolah, jajanan pasar, makanan catering, bahkan di toko-toko swalayan yang merupakan bentuk dari pasar modern.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan Balai Besar POM di Makassar terhadap Penggunaan bahan tambahan pangan yang melampaui batas di pasaran adalah dengan merujuk kepada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merumuskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen³⁴

Secara umum perlindungan konsumen tentang makanan yang melampaui batas & berbahaya sudah diatur di dalam Pasal 8 ayat (1,a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

“pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang; tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan”

³⁴ Nurmadjito, kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia

Kemudian Amirah Nilawati, S.si,Apt, MHSN, mengatakan berdasar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, setiap konsumen yang dirugikan dapat menyelesaikan sengketaanya melalui:

- a. Peradilan dalam lingkungan peradilan umum yang mengacu pada ketentuan yang berlaku di Pengadilan Negeri.
- b. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

Akan tetapi sayang, konsumen yang menggunakan Lembaga Peradilan Negeri untuk menyelesaikan sengketa konsumen ini tidaklah ada sama sekali. Langkanya konsumen untuk menyelesaikan sengketa melalui Badan Peradilan Negeri ini tidak terlepas dari permasalahan biaya yang dibutuhkan dalam beracara, sementara pokok perkara yang akan diperkarakan jauh lebih kecil.³⁵

Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia yang sangat diperlukan setiap saat dan dimanapun ia berada serta memerlukan pengelolaan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh. Empat fungsi pokok makanan bagi kehidupan manusia adalah untuk:

1. Memelihara proses tubuh dalam pertumbuhan / perkembangan serta mengganti jaringan tubuh yang rusak.
2. Memperoleh energi guna melakukan kegiatan sehari-hari.
3. Mengatur metabolisme dan mengatur berbagai keseimbangan air, mineral dan cairan tubuh yang lain.

³⁵ Aminarah nilawati.s.si,apt,Mhsn, (36 tahun), ahli muda seksi layanan informasi konsumen Balai Besar POM, wawancara, Makassar,09 September 2017.

4. Berperan didalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit.³⁶

Pada Pasal 1 Angka 5 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 37 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pewarna dijelaskan bahwa pewarna alami (*Natural Food Colour*) adalah pewarna yang dibuat melalui proses ekstraksi, isolasi, atau derivatisasi (sintesis persial) dari tumbuhan, hewan, mineral atau sumber alami lain, termasuk pewarna identik alami. Ada beberapa pewarna alami serta batas penggunaan maksimum yang di jelaskan dalam peraturan kepala badan pengawas obat dan makanan ini. Batas maksimum penggunaanya dapat dilihatpada tabel 1 berikut:



³⁶<http://maxschrist.blogspot.com/2009/08/fungsi-makanan.html>

Tabel. 1

Batas maksimum penggunaan pewarna alami

NO	Pewarna	Batas maksimum (mg/kg)
1	Kurkumin C.I.No 75300	0-3
2	Riboflavin	0-0,5
3	Karmin dan ekstrak cochineal C.I.No 75470	0-5
4	Klorofil C.I.No75810	Secukupnya
5	Klorofil dan klorofilin tembaga kompleks C.I.No 75810	0-15
6	Karamel I	Secukupnya
7	Karamel III amonia proses	0-200 untuk cair 0-150 untuk padat
8	Karamel IV amonia sulfit proses	0-200 untuk cair 0-150 untuk padat
9	Karbon tanaman C.I.No. 77266	Secukupnya
10	Beta-Karoten / sayuran C.I.No. 75130	Secukupnya
11	Ekstrak anato (berbasis bixin) C.I.No.75120	0-12
12	Karotenoid	0-15
13	Antosianin	0-2,5

Sumber: *Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat Makanan No.37 tahun 2013*

Tabel tersebut menunjukkan bahwa ada beberapa zat pewarna alami yang dibatasi penggunaannya sesuai dengan takaran perkilogramnya, akan tetapi ada juga zat pewarna yang batas penggunaannya menggunakan kata secukupnya atau sebanyak yang diperlukan. Penggunaan zat pewarna alami tersebut akan menambah nilai nutrisi atau gizi pada makanan serta aman jika ditambahkan pada makanan dan tidak akan mengganggu kesehatan.

Sedangkan untuk pewarna sintetis (*synthetic food colour*) yang merupakan pewarna yang diperoleh secara sintesis kimiawi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 6 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pewarna. Batas penggunaannya dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel. 2

Batas penggunaan maksimum pewarna sintetis.

No	Pewarna	Batas Maksimum (mg/kg)
1	Tartrazin CI.No.19140	0-7,5
2	Kuning kuinolin	0-5
3	Kuning FCF CI.No. 14720	0-4
4	Karmoisin CI. No. 14720	0-4
5	Ponceau 4R CI. No. 16255	0-4
6	Eritrosin CI. No. 45430	0-0,1
7	Merah allura CI. No. 16035	0-7
8	Indigotin CI. No. 73015	0-5
9	Biru berlian FCF CI.No.42090	0-12,5
10	Hijau FCF CI. No. 42035	0-25
11	Coklat HT CI. No. 20285	0-1,5

Sumber: *Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan No. 37 Tahun 2013*

Tabel tersebut menunjukkan bahwa penggunaan zat pewarna sintetis dibatasi penggunaannya sesuai dengan takaran per kilogram makanan yang akan ditambahkan zat pewarna. Penggunaan zat pewarna sintetis ini akan berpengaruh bagi kesehatan

jika digunakan secara terus menerus dan melebihi ambang batas penggunaan maksimumnya.

Pada pasal 10 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No 37 Tahun 2013 Tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan, dijelaskan bahwa Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan secara tertulis;
- b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk penarikan kembali dari peredaran;
- c. perintah pemusnahan, jika terbukti tidak memenuhi persyaratan keamanan atau mutu; dan/atau
- d. pencabutan izin edar.³⁷

Untuk mewujudkan perlindungan terhadap konsumen maka setiap produk pangan khususnya produk makanan wajib memenuhi standar keamanan dan mutu pangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Undang-Undang tentang Kesehatan bahwa makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan, dan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal

³⁷Dr. Andi Mulyati, Apt. (42 tahun), Staf Bidang Pemeriksaan Balai Besar POM Sulawesi Selatan, wawancara, Makassar 07september 2017.

tersebut dilakukan untuk memenuhi hak konsumen yakni berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.

Untuk mewujudkan hak konsumen tersebut maka dalam Pasal 87 Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan menentukan bahwa pemerintah dapat menetapkan persyaratan agar pangan diuji di laboratorium sebelum diedarkan, pengujian yang dimaksudkan dilakukan di laboratorium yang ditunjuk oleh dan/atau yang telah memperoleh akreditasi dari pemerintah.

Adapun sanksi apabila terjadi pelanggaran, ada 2 sanksi yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif yaitu apabila tingkat risikonya itu rendah atau kategori pelanggarannya itu rendah maka pihak Balai Besar POM melakukan pembinaan kemudian pemanggilan dan setelah itu diberikan peringatan sampai peringatan pra, namun apabila produknya bermasalah maka produk tersebut tetap harus di musnahkan, sedangkan sanksi pidana yaitu apabila produk tersebut tidak memenuhi persyaratan atau tanpa izin edar dan kadaluwarsa tingkat risikonya juga tinggi maka dikembalikan ke peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pasal 142 yang menegaskan bahwa :

“pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah)”

Upaya pengujian terhadap pangan sebelum beredar dan bahkan pangan yang telah beredar harus dilakukan karena tidak sedikit pelaku usaha yang tidak beritikad baik dalam menjalankan usahanya sesuai dengan kewajiban pelaku usaha yang telah ditentukan dalam UUPK Pasal 7 huruf (a) yaitu kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik

Pada Pasal 62 angka 1 UUPK ditentukan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda palingbanyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). dalam melakukan kegiatan usahanya.

C. Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Penggunaan Batas Maksimum Pada Bahan Tambahan Pangan di Kota Makassar

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, pemerintah membentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menunjukkan perhatian pemerintah dalam melakukan pengawasan serta menjamin keamanan produk pangan yang beredar di masyarakat, pada Pasal 67 Keputusan Presiden tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan.

Sesuai dengan keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 0501/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Maka Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terdiri dari : Bidang Pengujian Terapeutik , Narkotika, Obat Tradisional, dan Produk Kompleks yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu bidang di bidang produk terapeutik, narkotika, obat tradisional, kosmetik dan produk kompleks. Dan Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen yang bertugas melaksanakan

penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu dan layanan konsumen.³⁸

Salah satu tugas Balai Besar POM adalah melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan kemasan dilakukan dua jenis pengawasan yaitu pengawasan rutin dan pengawasan khusus. Pengawasan rutin adalah pengawasan yang dilakukan setiap bulannya, sedangkan pengawasan khusus adalah pengawasan yang dilakukan apabila ada kasus makanan tertentu.

Pengawasan rutin yang dilakukan Balai Besar POM melalui program sebagai berikut:

1. Pengawasan sarana produksi
2. Pengawasan sarana distribusi
3. Sampling dan pengujian hasil sampling
4. Pengawasan iklan dan label pangan
5. Pengawasan pangan berlabel halal

Pola pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM adalah melakukan pengawasan ditingkat peredaran yaitu pengawasan dilakukan pada toko-toko, pasar dan swalayan, atau disebut juga dengan sarana peredaran kalau dalam pengawasan terhadap sarana peredaran ditemukan makanan yang tidak memiliki izin edar/illegal maka pelaku usaha di tegur dan diberi peringatan.

³⁸ http://www.academia.edu/9263250/LAPORAN_PKPA_BALAI_BPOM_

Adapun 2 bentuk pengawasan yang dilakukan Balai BPOM dalam mengantisipasi peredaran produk makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan khasiat yaitu :

1. Kontrol pra pasar yaitu sebelum suatu produk mencapai pasar, caranya adalah:
 - a. Melalui instrumen perizinan, suatu produk baru bisa dipasarkan jika sudah lulus uji laboratorium pemerintah.
 - b. Melalui pendaftaran pendahuluan (pre-registration), biasanya hal ini dilakukan melalui pembentukan standar teknis yang disusun oleh lembaga standarisasi nasional. Selain itu produsen juga harus mendokumentasikan bahwa produk tersebut telah memenuhi standar teknis tersebut.
2. Kontrol pasca pasar yaitu berhubungan dengan produk yang sudah beredar di pasar dan tidak aman. Selama ini secara internasional belum ada keseragaman tentang bagaimana cara menarik produk yang tidak aman dari pasar. Namun bagaimanapun caranya produk-produk yang tidak aman harus ditarik dari pasaran.

Balai BPOM dalam melakukan pengawasan kontrol pra pasar tentang makanan yang tidak memiliki izin edar dan kadaluwarsa melakukan beberapa prosedur, yaitu:

1. Pengawasan kesaran pabriknya untuk memeriksa barang tersebut sebelum diedarkan.
2. Melakukan penyuluhan ke masyarakat dalam bentuk mengumpulkan masyarakat kemudian berinteraksi dengan masyarakat untuk memberikan ilmu

pengetahuan tentang dan kriteria makanan yang menjamin keamanan sehingga baik untuk dikonsumsi.

3. Melakukan instrumen perizinan, suatu produk baru bisa dipasarkan jika sudah lulus uji laboratorium di Balai Besar POM.
4. Melalui pendaftaran pendahuluan (pre-registration), biasanya hal ini dilakukan melalui pembentukan standar teknis yang disusun oleh lembaga Standar Nasional. Disamping itu produsen juga harus mendokumentasikan bahwa produknya telah memenuhi standar teknis tersebut.
5. Dengan menyediakan layanan informasi melalui stasiun TV seperti membuat iklan tentang makanan yang tidak layak edar, agar masyarakat dapat mengetahui dan membedakan produk makanan yang aman dan tidak aman.

Sedangkan pengawasan kontrol pasca pasar yang dilakukan oleh Balai Besar POM terhadap peredaran makanan yang tidak memenuhi syarat mutu, keamanan dan khasiat yaitu:

1. Dengan melakukan penyuluhan ke produsen dalam bentuk pengawasan terhadap barang yang akan dijual pelaku usaha.
2. Memberikan pengawasan ke pelaku usaha agar bisa melakukan pembuatan proses menjual barang yang memadai dengan ketentuan dan harapan, bahwa apa yang dibuat oleh distributor nanti sesuai dengan ketentuan yang ada.
3. Dalam proses pengawasan petugas Balai Besar POM mengambil produk makanan secara acak untuk mengambil produk makanan yang bermasalah, makanan yang diambil secara acak itu dibawa ke kantor kemudian diuji

laboratorium, dimana Balai Besar POM membeli semua produk makanan yang bermasalah itu, bukan mengambil secara gratis agar tidak membebani para produsen atau pelaku usaha.

4. Dengan mengawasi tata cara rating (retail) yang baik diberbagai tempat penjualan produsen, seperti dengan menempatkan kelompok minuman dan makanan ditempat khusus makanan.
5. Jika Balai Besar POM menemukan makanan yang tidak sesuai dengan persyaratan baik itu kadaluwarsa atau tidak memiliki izin edar di pasaran, maka makanan tersebut akan dimusnahkan langsung di tempat tersebut dan yang melakukan pemusnahan tersebut adalah penjual dengan disaksikan oleh petugas Balai Besar POM.

Badan POM dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dalam perlindungan konsumen, khususnya dalam peredaran makanan kemasan tanpa izin edar dan dan kadaluarsa maka di BPOM di bentuk Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan BPOM yang diberi Kewenangan sebagai penyidik untuk m melakukan penyidikan tentang produk makanan kemasan yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan khasiat, bukan hanya menjadi wewenang Polri tetapi dapat juga dilakukan oleh penyidik BPOM. Penyidik BPOM mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan pelanggaran di bidang perlindungan konsumen.

2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau benda yang melakukan tindak pelanggaran di bidang perlindungan konsumen.
3. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan sehubungan dengan peristiwa tindak pelanggaran di bidang perlindungan konsumen.
4. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran di bidang perlindungan konsumen.
5. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dijadikan bukti dalam perlindungan konsumen.
6. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang pelanggaran konsumen.

Penyidik BPOM dalam melakukan kewenangannya tersebut memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada penyidik pejabat Kepolisian Republik Indonesia dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum melalui penyidikan pejabat Kepolisian Republik Indonesia.

Hasil wawancara penulis (Kamis, 09 September 2017) dengan Amirah Nilawati, S.si. Apt, Mhsn ahli muda Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen (SerLIK), menyatakan bahwa tugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yaitu;

1. Pengawasan sarana makanan;
2. Pengambilan contoh makanan (sampling);
3. Pengujian makanan;

4. Penyebaran informasi;
5. Bimbingan kepada petugas dinas di Kabupaten/Kota;
6. Bimbingan kepada Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP);
7. Pembinaan kepada kantin-kantin sekolah;
8. Pengawasan terhadap makanan jajanan;
9. Menyediakan layanan informasi konsumen;

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan telah melaksanakan fungsinya dalam melakukan pengawasan terhadap makanan dan minuman yang tidak sesuai dengan aturan atau mengandung tambahan pangan yang melampaui batas.

Sesuai dengan data yang diberikan oleh Pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan kepada Penulis pada tanggal 07 September 2017. Beberapa makanan yang memenuhi syarat & tidak memenuhi syarat dalam sampling yang telah di ambil sebelumnya oleh pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Dapat dilihat pada tabel 3 berikut;

Tabel. 3

Hasil Pengujian Pangan Menurut Parameter Uji

No	Jenis Parameter Uji	jumlah	Hasil pengujian	
			Ms	Tms
1	Pewarna	798	788	10
2	Pemanis	730	712	17
3	Pengawet	298	296	2
4	Pengasam	562	535	27
5	Total	2388	2331	56

Sumber: Laporan Tahunan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2016

ket:

**Ms: Memenuhi Syarat*

**Tms: Tidak Memenuhi Syarat*

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 2388 total jumlah uji parameter laboratorium bahan tambahan pangan terdapat 2331 jenis makanan yang memenuhi syarat dan hanya 56 yang tidak memenuhi syarat.

Hal tersebut membuktikan bahwa Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan sudah menjalankan peranannya. Dapat dilihat dari kurangnya jenis makanan yang tidak memenuhi syarat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan yang diizinkan diantaranya :

1. Bahan pengawet, yaitu bahan yang mengandung senyawa yang mampu menghambat fermentasi, pengasaman, kerusakan dan pembusukan.
2. Bahan pewarna, yaitu bahan untuk mempengaruhi warna dan rasa makanan.
3. Bahan pemanis, berfungsi untuk meningkatkan cita rasa dan aroma, memperbaiki sifat-sifat fisik, memperbaiki sifat-sifat kimia sekaligus merupakan sumber kalori bagi tubuh.
4. Bahan pengatur keasaman, yaitu untuk memperoleh rasa asam yang tajam, sebagai pengontrol Ph atau sebagai pengawet.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil penelitian. Maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan terciptanya perlindungan hukum bagi konsumen maka setiap produk pangan khususnya makanan wajib mengikuti standar keamanan dan mutu pangan, Sebagaimana yang diatur dalam pasal 111 undang- undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwa makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan, dan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. yaitu kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melakukan usahanya.
2. Peranan pemerintah dalam hal ini adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Makassar dalam mengawasi makanan yang mengandung bahan tambahan pangan yang berbahaya dan melampaui batas maksimum yaitu dengan cara menugaskan secara berkala pegawai dari bidang pemeriksaan dan penyidikan ke pasar-pasar tradisional, toko-toko swalayan, pabrik atau industri rumah tangga untuk pengambilan sampel makanan yang terdeteksi mengandung bahan tambahan pangan yang tidak sesuai dengan ketentuan, yang kemudian akan dilakukan pengujian di laboratorium. Serta memusnahkan makanan tersebut jika dari hasil pemeriksaan, makanan

tersebut mengandung bahan tambahan pangan yang berbahaya atau tidak sesuai dengan ketentuan..

2. Saran

1. Kepada para konsumen harus teliti dalam memilih produk makanan yang akan di konsumsi. Jika mengetahui ada pelaku usaha yang menggunakan zat berbahaya yang dilarang atau yang tidak sesuai dengan batas maksimum bahan tambahan pangan, jangan takut untuk melaporkan kepada pemerintah atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat
2. Pelaku usaha wajib beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, jangan hanya memikirkan keuntungan pribadi tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan dari produksi makanan yang bila mana menggunakan bahan tambahan pangan yang menggunakan. Karena dapat menimbulkan gangguan kesehatan bagi konsumen
3. kepada pemerintah seharusnya lebih aktif dalam pengawasan terhadap pangan khususnya tambahan bahan pangan yang melampaui batas yang telah di tentukan standarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Nurhayati. 2011. *Tanggung Jawab Produk Terhadap Konsumen dan Implementasinya pada Produk Pangan*. Makassar: ASPublishing.
- Az Nasution. 1995. *Konsumen dan Hukum Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Cahyadi Wisnu. 2009. *Analisis dan Aspek Kesehatan Bahan Tambahan Pangan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono Redjeki Sri. 2000. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*. Bandung: Mandar Maju.
- Miru Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers
- Miru Ahmadi. 2013. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- N.H.T. Sihan. 2005. *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produsen*. Jakarta: Panta Rei
- Nugroho Adi Susanti. 2011. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana.
- Rajagukguk Erman, Nurmardjito, dkk. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.
- Safieoedin Azis, 1999. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Daya Widya..
- Sidabalok Janus. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sudaryatmo.1999. *Hukum & Advokasi Konsumen*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sutedi Adrian. 2008. *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*.
Bogor: Ghalia Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Permenkes No 33 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 772/Menkes/Per/ IX/1988 dan
No.1168/Menkes/PER/X/1999.

PerKa BPOM No. 37 tahun 2013 Tentang Batas Maksimum penggunaan Bahan
Tambahan Pangan Pewarna.

PerKa BPOM No. 36 Tahun 2013 Tentang Batas Maksimum penggunaan Bahan
Tambahan Pangan Pengawet.

Website :

[Id.m.wikipedia.org/wiki/Aditif_makanan](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Aditif_makanan)id.m.wikipedia.org/wiki/Bahan_pewarna

<https://fhienhasidwi.wordpress.com/2013/04/03/pewarna-alami-danpewarnasintetik/>

<https://informasisihat.wordpress.com/tag/bahan-pewarna-makanan/>

<http://chabibullah.com/makalah-zat-aditif/>

e-journal.uajy.ac.id/1356/2/1HK09051.pdf

<http://kimrani.blogspot.com/2013/02/dampak-penggunaan-natriumbenzoat.html>

<http://adivanminus.blogspot.com/2012/02/pengaruh-banyaknya-bahantambahan>

html

<http://aabisnis.blogspot.com/2008/04/zat-aditif.html>



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Batas Maksimum pada Bahan Tambahan Pangan di Kota Makassar”. Bernama Lengkap A. Fauzi Nursyamsu, Nim 10500113294, Lahir di Makassar 13 Oktober 1995,

Merupakan anak kedua dari dua orang bersaudara dari pasangan Bapak Nursyamsu Rachman dan Ibu Nurhaedah Faried.

Penulis Mengawali Pendidikan dasar formal di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Mangasa 1 Tahun 2001-2007. Penulis sempat melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Sungguminasa Tahun 2007-2008, dan kemudian lulus di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sombaopu Tahun 2008-2010. Penulis kemudian sempat melanjutkan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 3 Sungguminasa Tahun 2010, dan kemudian Lulus di SMAN 1 Sungguminasa (salis) Tahun 2010-2013. Penulis kemudian melanjutkan studi di Perguruan tinggi negeri Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM), di Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum (IH) Pada tahun 2013-2017.



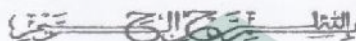
**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No.63 Telp.864924 (Fax 8649923)

Nomor : -
Lamp : -
Hal : Permohonan Judul Skripsi

Kepada Yth :
Ketua Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Di,-

Tempat



Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Teriring salam dan doa' semoga segala aktifitas keseharian kita bernilai ibadah di sisi nya. Amin

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : A Fauzi Nursyamsu
NIM : 10500113294
Fak/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Ilmu Hukum
Semester : VII (Tujuh)

Dengan ini ingin mengajukan permohonan judul skripsi dan penetapan pembimbing sebagai berikut:

- Acc. (2)
1. TINJAUAN PENERAPAN SANKSI PERDATA TERHADAP KORPORASI DALAM SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
 2. PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN ZAT ADITIF PADA MAKANAN
 3. TINJAUAN KETERTARIKAN MASYARAKAT TENTANG SISTEM PENYELESAIAN SENGKETA LUAR PENGADILAN (NON LETIGASI) DI KABUPATEN GOWA

Demikian surat permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan banyak terimakasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb

Samata, 28 Oktober 2016

Mengetahui,

Penasehat Akademik (PA)

Pemohon

Abdi Widjaja, SS, M.Ag

NIP: 19711005 200501 1 009

Adrian Fauzi Nusyamsu

NIM: 10500113294



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 446 Tahun 2017
TENTANG DOSEN PEMBIMBING DRAF/SKRIPSI
TAHUN 2017**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Menimbang** :
- a. Bahwa penulisan karya ilmiah (skripsi) merupakan salah satu persyaratan pada Jenjang strata satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Untuk itu dipandang perlu menetapkan dosen pembimbing,
 - b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk di angkat dan diserahi tugas sebagai dosen Pembimbing Draft/Skripsi.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan pemerintah RI. Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar
 4. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja UIN Alauddin Makassar
 5. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- a. Menunjuk saudara :
 1. Drs. Munir Salim.MH
 2. St. Nurjannah. SH. MII

Sebagai pembimbing mahasiswa :

Nama : A. Fauzi Nursyamsu
N I M : 10500113294
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Ilmu Hukum
Judul Skripsi : "Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Zat Aditif Pada Makanan"

- b. Melaksanakan pembimbing Skripsi sampai mahasiswa tersebut menyelesaikan penulisan karya ilmiah secara profesional;
- c. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017
- d. Surat keputusan disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata

Pada tanggal : 21 April 2017



Prof. Dr. Darussalam Svamsuddin, M.Ag

NIP. 19621016 199003 1 003

**LEMBAR PENGESAHAN
DRAFT SKRIPSI**

**“Perlindungan Konsumen Dari Makanan Dan Minuman Yang Mengandung Zat
Aditif Di Kota Makassar .”**

Disusun dan Diajukan Oleh

**A. Fauzi Nursyamsu
NIM : 10500113294**

Telah disetujui oleh Pembimbing untuk melanjutkan Penulisan skripsi

Pada tanggal 31 juli 2017

Pembimbing I



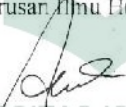
Drs. Munir Salim, MH
NIP.195312311978031006

Pembimbing II



St. Nurjannah, SH.MH
NIP. 1976082220031220003

Diketahui Oleh
Ketua Jurusan Ilmu Hukum



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Istiqamah, SH., MH
NIP: 19680120 199503 2 001

ALAUDDIN

MAKASSAR

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Mengesahkan

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP: 19621016 199003 1 003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 ALAUDDIN Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 4132 Tahun 2017
T E N T A N G
PANITIA DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI TAHUN 2017

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan :
 N a m a : A. Fauzi Nursyamsu
 N I M : 10500113294
 Jurusan : Ilmu Hukum
 Hari/Tanggal : Kamis, 9 November 2017
 Prihal : Ujian Seminar Hasil/Skripsi
 Judul : "Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Batas Maksimum Pada Bahan Tambahan Pangan di Kota Makassar"
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil/Skripsi;
 b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
 c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
 6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Hasil/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
- Ketua : Prof. Dr. Darussalam, M.Ag
 Sekretaris : Rahman Syamsuddin, S.H., M.H
 Penguji I : Dr. Marilang, M.Hum.
 Penguji II : Istiqamah, S.H., M.H
 Pelaksana : 1. Mujahidah, SE
 2. Nurhayati Wahid
- Kedua** : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil/Skripsi
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata Gowa
 Pada tanggal : 3 - November 2017



Prof. Dr. Darussalam, M.Ag
 NIP. 19621020 199003 1 003

Tembususan

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
 Nomor 1077 Tahun 2017
TENTANG
PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI
TAHUN 2017

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan :
- Nama : A. Fauzi Nursyamsu
 N I M : 10500113294
 Jurusan : Ilmu Hukum
 Hari/Tanggal : Senin, 27 November 2017
 Prihal : Ujian Munaqasyah/Skripsi
 Judul : "Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Batas Maksimum pada Bahan Tambahan Pangan di Kota Makassar"
- Menimbang** :
- Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Munaqasyah/Skripsi;
 - Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
 - Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
 - Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
 - Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Junto Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
 - Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Munaqasyah/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
- Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
 Sekretaris : Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag.
 Penguji I : Dr. Marilang, M.Hum
 Penguji II : Istiqamah, S.H., M.H.
 Pelaksana : 1. Mujahidah, S.E
 2. Nurhayati Wahid

- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata Gowa
 Pada tanggal : November 2017



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
 NIP. 19621016 199003 1 003

Tembususan
 Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa

Gambar Foto Penelitian Penulis Bersama Ibu Amirah Nilawati, Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi (serlik) Balai Besar Pengawasan Obat Makanan (BBPOM) kota Makassar.

